

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
113-K/PM.II-09/AD/IV/2015)**

Hariyanto

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur para pengguna transportasi di wilayah Negara Republik Indonesia agar mereka secara tertib dan tidak semena-mena dalam menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya pemerintah diwujudkan dengan menyusun menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan kerugian harta benda pada pemiliknya. Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pelanggaran ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Kecelakaan Lalu Lintas, Militer

THE JURIDICAL REVIEW OF TRAFFIC ACCIDENTS WHICH REPRESENTS MISSING LOSS OF OTHER PEOPLE MADE BY THE MILITARY (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 113-K / PM.II-09 / AD / IV / 2015)

Hariyanto

Abstract

The Government of Indonesia has attempted to arrange transportation users in the territory of the Republic of Indonesia to order them in an orderly manner and not arbitrarily in the use of traffic facilities and infrastructure. Government efforts are realized by preparing the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport, which will be further referred to the Traffic and Road Law. Traffic Accidents are unexpected and unintentional incidents involving vehicles with or without other road users that result in human casualties and / or property losses. Traffic accidents are incidents of road traffic that at least involve a vehicle causing injury or damage or damage to the owner. From several definitions of traffic accidents it can be concluded that traffic accidents are an event of unexpected and unwanted road traffic that is difficult to predict when and where they occur, at least involving a vehicle with or without other road users causing injury, trauma, Disability, death, and property loss to the owner. The Indonesian National Army or members of the military are part of an Indonesian citizen who is equal to ordinary members of society who are likely to commit a legal violation. When viewed from the perspective of the criminal justice system in Indonesia, military personnel have the same position as ordinary members of society. The provisions governing the behavior of TNI members are set forth in the form of disciplinary regulation, which is stated in Law no. 26 of 1997 concerning the Law of the Discipline of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, the violation of criminal law provisions by TNI members shall be processed in accordance with applicable criminal law, which is processed and submitted to military tribunals.

Keywords: Responsibility, Traffic Accident, Military